

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan bergulirnya UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menandakan bahwa masa depan Indonesia sangat dipengaruhi oleh pembangunan di daerah. Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Keleluasaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah selayaknya dapat menjadi momentum untuk melaksanakan pemerintahan dengan lebih baik, bersih, efektif dan efisien dalam mendukung serta menjalankan berbagai program nasional di tingkat daerah melalui kerja nyata. Program nasional tersebut antara lain Nawacita Jokowi-JK, Indonesia Emas 2045, dan berbagai program lainnya. Apabila Pemerintah Daerah dapat berkolaborasi bersama Pemerintah Pusat dengan baik, maka keberhasilan yang gemilang bukan lagi hanya sebatas mimpi. Selain itu, rakyat akan semakin memiliki kepercayaan kepada pemerintah dan merasakan tentang arti pentingnya peran pemerintah dalam penataan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Namun faktanya Pemerintah Daerah dalam pengalokasian pendapatan daerah cenderung digunakan untuk keperluan belanja rutin daripada belanja modal. Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Pemerintah

Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2017. Kegiatan belanja (pengeluaran) Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Untuk membiayai pengeluaran tersebut maka dibutuhkan sumber-sumber penerimaan dari daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Nuarisa, 2013).

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam Pemerintah Daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah (Sudarwadi, 2015).

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja

modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD.

Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya (Sudarwadi, 2015).

Dalam penelitian sebelumnya ada beberapa hasil penelitian yang variatif. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Saleh (2017), PAD berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, begitupun penelitian yang dilakukan oleh Rihfenti Ernayani (2017) yang mengatakan bahwa DAU dan DAK berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Adalagi penelitian yang dilakukan oleh Edy Susanto dan Marhamah (2016) yang mengatakan DAU dan DAK yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan juga penelitian yang

dilakukan Firda (2018) yang mengatakan bahwa DBH Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada dasarnya penelitian ini berusaha ingin mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan melalui Belanja Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil terhadap pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Moderating (studi empiris di kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2016-2017).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
- b. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
- c. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
- d. Apakah Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
- e. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Moderating?
- f. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Moderating?
- g. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Moderating?
- h. Apakah Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Moderating?

1.3 Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan objek penelitian penulis adalah

- a. Untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten/Kota yang menjadi objek penelitian, penulis membatasi hanya LRA pada tahun 2017-2018.
- b. Untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi objek penelitian, penulis membatasi hanya PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2017- 2018.
- c. Untuk Kabupaten/Kota yang menjadi objek penelitian, penulis membatasi hanya Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang sudah di jelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian itu sendiri meliputi

- a. Untuk manguji pengaruh Pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Untuk manguji pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
- c. Untuk manguji pengaruh dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah.
- d. Untuk manguji pengaruh dana bagi hasil pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah.
- e. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah sebagai variabel moderating.

- f. Untuk menguji pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah sebagai variabel moderating.
- g. Untuk menguji pengaruh dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah sebagai variabel moderating.
- h. Untuk menguji pengaruh dana bagi hasil pajak terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah sebagai variabel moderating.

1.5 Manfaat penelitian

Manfaat dalam penelitian ini ada 3 adalah sebagai berikut :

- a. **Kontribusi Empiris**

Manfaat dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris dan memperkuat penelitian sebelumnya mengenai pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah sebagai variabel Moderating di Kabupaten/Kota Semarang.

- a. **Kontribusi Kebijakan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Semarang terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan pemerintahan dan otonomi daerah

- b. **Kontribusi Teori**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepustakaan sebagai informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kajian pustaka, dan pengertian serta definisi yang menjadi dasar dalam penulisan, juga mengungkapkan kerangka pemikiran teoretis serta perumusan hipotesis.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisikan deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional dengan menggunakan variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta rancangan analisis data.

BAB IV DATA DAN ANALISIS DATA

Berisikan hasil dan pembahasan hasil penelitian tentang deskriptif statistik, variabel penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian kelima berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran atas penelitian yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. (2013). *Statistika Deskriptif Plus untuk Ekonomi dan Bisnis*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- BPS. (2017). Laporan Akhir Analisis Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Tahun 2016-2017. Badan Pusat Statistik. <http://www.bps.go.id>
- BPS. (2017). Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2016-2017. Badan Pusat Statistik. <http://www.bps.go.id>
- Ernayani, Rehfenty. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan Vol. 1 No.1*
- Fauzyny, Wulan. (2013). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Skripsi*.
- Hapid, Muh. Halim dan Yuli Wulandari. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan. ISSN 2339-1529. Vol. 02 No. 1.*
- Jaeni, Greg. Anggana L. (2016). Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Universitas Stikubank Semarang*.
- Merina, Citra Indah (2016). Determinan Pengalokasian Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Provinsi Indonesia. *Skripsi Universitas Bina Dharma*.
- Nur Hanifa, Firda (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi STIE SBI*.
- Pemerintah Indonesia. (1997). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 1997, No. 18. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2000). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2000, No. 34 Sekretariat Negara. Jakarta.

- Pemerintah Indonesia. (2004). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 33. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 28. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 23. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Putri, T. W. W., & Susliyanti, E. D. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Pendekatan Value For Money (Studi Pada Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Jambidan Tahun Anggaran 2014–2016). *Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 14(1).
- Rasyid, Mohamad. (2018). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah. *E-Jurnal Katalogis. Universitas Tadulako. Vol. 6 No. 1. ISSN: 2302-2019*
- Saleh. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Moderating. *Publikasi Ilmiah*.
- Sari, D. L., & Susliyanti, E. D. (2020). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1).
- Sarwono Dan Herlina. (2012). *Statistik Terapan Aplikasi Untuk Riset Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Penerbit PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Siagian, Erlinda (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi D.I Yogyakarta. *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Susanto, Edy Dan Mahamah (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal STIE Semarang*.
- Susliyanti, E. D. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa. *Wahana*, 20(1), 13-23.
- Susliyanti, E. D., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa. *Efektif Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 1.

Untung, Joko, Tri Widyastuti dan Suyanto. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Terhadap Belanja Daerah dan Dana Bagi Hasil Sebagai Pemoderasi Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat Priode Tahun 20102014. *Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika. Universitas Pancasila. Vol. 1 No. 2.*